

TANGGAPAN BP TERHADAP

LAPORAN PERTAMA

**PANEL PENASIHAT INDEPENDEN
TANGGUH (TIAP)**

MENGENAI OPERASIONAL

DAN

PROPOSAL PENGEMBANGAN

PROYEK LNG TANGGUH

MEI 2014

Singkatan dan istilah

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Bupati	Kepala daerah kabupaten
CAPs/ PBM	Perencanaan Bersama Masyarakat – program dukungan untuk memfasilitasi proyek pembangunan berbasis masyarakat di kampung-kampung yang terkena dampak langsung
DAV	Kampung yang diidentifikasi terkena dampak langsung Proyek Tangguh
DBH	Dana Bagi Hasil
DBH SDA	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Gol	Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)
ICBS	Integrated Community Based Security (Program Keamanan Terintegrasi Berbasis Masyarakat)
IEDP	Indigenous Enterprise Development Program (Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Asli)
IHT	In-House Human Right Training (Pelatihan Hak Asasi Manusia Swakarya)
IPB	Institut Pertanian Bogor
ISP	Integrated Social Program (Program Sosial Terpadu) – unit pelaksana dalam Proyek Tangguh dan program pengembangan sosial ekonomi yang dikelola oleh unit tersebut
ITT	Invitation to Tender (Undangan Tender_
JUKLAP	Petunjuk Lapangan
Kabupaten	Distrik atau Kabupaten
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Elsham	LSM Hak Asasi Manusia di Papua
LP3BH	Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum
LNG	Gas Alam Cair
Mmscfd	Juta Standar Kaki Kubik per Hari
Musrenbang	Musyawahar Perencanaan Pembangunan
MoE	Ministry of Environment (Kementerian Lingkungan Hidup (KLH))
MoU	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
MRP	Majelis Rakyat Papua
NGO	Non Government Organization (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Pangdam	Panglima Komando Daerah Militer
Perdasus	Peraturan Daerah Khusus
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PoD	Rencana Pengembangan
Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor
Polsek	Kepolisian Sektor
PONED	Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar

Proper

Audit kepatuhan AMDAL yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup

PSC	Production Sharing Contract - Kontrak Kerja Sama
PSCM	Procurement and Supply Chain Management (Manajemen Pengadaan dan Rantai Suplai)
PSKK UGM	Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
S&OR	Safety & Operation Risk (Risiko Keselamatan dan Operasional)
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, lembaga pemerintah Indonesia yang merupakan regulator dalam Proyek Tangguh (yang menggantikan BPMIGAS)
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SOA	Supply Offtake Agreement (Kesepakatan Pembelian Produksi) Pertambangan
SPA	Sales Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli)
TEP	Tangguh Expansion Project (Proyek Pengembangan Tangguh)
TIAP	Tangguh Independent Advisory Panel (Panel Penasihat Independen Tangguh)
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPC	Third Party Contract (Kontrak Pihak Ketiga)
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UNIPA	Universitas Negeri Papua di Manokwari, Papua Barat
UP4B	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
VPSHR	Voluntary Principles of Security and Human Right (Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan Dan Hak Asasi Manusia)
YSA	Yayasan Sosial Agustinus (mitra pelaksana untuk Kesehatan)
YPTB	Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni

Kata Pengantar

BP mengucapkan terima kasih kepada Panel Penasihat Independen Tangguh (TIAP) yang kini menjabat, atas laporan dan analisis ahli, tantangan dan panduan yang diberikannya. Fokus utama TIAP adalah masalah keamanan, hak asasi manusia, tata kelola dan pengelolaan pendapatan, serta isu-isu non-komersial lain. Isi laporan ini melengkapi kajian independen panel eksternal yang dilaksanakan oleh Grup Pemberi Pinjaman Tangguh.

Rekomendasi yang diberikan TIAP yang saat ini tengah menjabat dan pendahulunya sangat bermanfaat untuk mendukung upaya kami menjadikan Proyek Tangguh sebagai barometer keberhasilan kerja sama dengan masyarakat lokal dan mitra lain untuk mengelola isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kompleks. TIAP membantu kami memastikan LNG Tangguh memberikan manfaat bagi BP, masyarakat lokal, pemerintah, karyawan, konsumen dan investor.

Kunjungan TIAP terdahulu dilaksanakan dari tanggal 14 Juli sampai 25 Juli, 2012. Lapornya diterbitkan bulan Oktober 2012 dan memuat 29 rekomendasi yang mencakup keamanan dan hak asasi manusia, hubungan pemerintah dan urusan publik, program sosial, ketenagakerjaan dan pelatihan masyarakat Papua, tata kelola dan transparansi, pengelolaan pendapatan, lingkungan dan Pengembangan Tangguh. BP telah menanggapi dan menerapkan berbagai rekomendasi tersebut (perkembangan terkini dapat dilihat di Apendiks A).

TIAP melakukan kunjungan ketiga dari tanggal 10 Maret hingga 18 Maret 2014 dan laporannya telah diterbitkan di bulan Mei 2014. Dalam laporan ini, TIAP menyoroti perubahan yang terjadi di tingkat nasional dan lokal serta tantangan yang dihadapi Tangguh akibat perubahan tersebut. TIAP juga mengamati perubahan yang terjadi dalam Proyek Pengembangan Tangguh dan AMDAL-nya. Meski sejauh ini Tangguh telah berhasil melaksanakan berbagai program sosialnya, TIAP menyoroti berbagai risiko yang harus diatasi dan peningkatan yang dapat dilakukan.

Kami sangat menghargai analisis mendalam dan tajam dalam laporan komprehensif ini. Kami yakin laporan ini akan membantu kami menghadapi tantangan terkait pengoperasian Tangguh dalam jangka panjang serta mendukung pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Proyek LNG Tangguh

Tangguh LNG memproduksi dan mengekspor gas alam cair (LNG) dari lapangan Vorwata yang terletak di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Indonesia, sekitar 3.000 kilometer di sebelah timur Jakarta.

Gas ditemukan di Teluk Bintuni pada tahun 1994 dengan cadangan terbukti sebanyak 14 triliun kaki kubik (tcf) setelah dieksplorasi. Gas diekstraksi melalui sumur yang digali menggunakan dua anjungan berkaki enam tak berawak yang dikendalikan dari jauh yaitu Vorwata-A dan Vorwata-B, kemudian dialirkan ke kilang pengolahan di sebelah selatan teluk melalui pipa bawah laut sepanjang 22 kilometer. Kilang ini mengoperasikan dua *train* atau perangkat pengolahan LNG dengan kapasitas produksi sekitar 7,6 juta ton LNG per tahun selama 25 tahun. LNG disimpan di dua tangki berkapasitas 170.000 meter kubik dan dialirkan melalui pipa ke dermaga untuk selanjutnya dimuat ke dalam kapal tanker.

Produksi LNG pertama kali dimulai pada Juni 2009, dan pengiriman pertama dilakukan sebulan setelahnya menggunakan kapal tanker ke Korea Selatan. Produksi meningkat dari 103 kargo di tahun 2012 menjadi 114 di tahun 2013, melebihi target awal 107 kargo. Di akhir tahun 2013, lebih dari 300 kargo telah dikirim oleh Tangguh, dan kilang mencapai efisiensi operasional tahunan rata-rata 89% - naik dari 81% di tahun 2012. Target efisiensi operasional untuk tahun 2014 adalah 93%. Kilang telah mencapai dan mempertahankan kinerja pada tingkat 100% kapasitas desain. Kilang LNG Tangguh adalah salah satu kilang LNG dengan kinerja terbaik sedunia dan merupakan proyek BP dengan kinerja terbaik di bidang keselamatan, produksi dan biaya. Prestasi ini diraih dengan mematuhi semua

komitmen nonteknis/eksternal kami.

Tanggung memiliki tujuh Perjanjian Jual Beli (SPA) untuk memasok LNG ke POSCO dan SK E&S Co., Ltd di Korea, Sempra LNG International LLC di Mexico, CNOOC Fujian LNG Co. Ltd di China, serta Tohoku Electric Power Co., Inc., Chubu Electric Power Co. Inc., dan Kansai Electric Power Co. Inc. di Jepang. BP terus mencari peluang untuk memaksimalkan nilai kargo LNG Tangguh. Sejak 2010, beberapa kargo yang dialihkan dari Sempra telah dijual di pasar Asia dalam bentuk kontrak jangka menengah atau penjualan spot.

Ke depannya, Tangguh berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan operasional yang andal dan meningkatkan efisiensi operasional kilang 1 dan 2 pada kapasitas penuh, sementara pengembangan untuk membangun kilang 3 tengah direncanakan. Proyek Pengembangan Tangguh (Tanggung Expansion Project) akan memperluas kilang LNG yang ada sekarang. Proyek ini memasuki tahap *Define* di bulan Desember 2013. Kilang LNG 3 dan fasilitas penunjangnya akan berlokasi di dekat kilang 1 dan 2. Proyek ini akan mengembangkan 4,3 triliun kaki kubik (Tcf) gas, melalui penambahan kilang LNG standar 3,8 juta ton per tahun (mtpa) – untuk penjualan di pasar Indonesia dan Asia.

Di lepas pantai, 16 sumur baru akan dibor dari dua anjungan baru yang belum terpakai (Roabiba dan Wiriagar). Platform ini akan dihubungkan ke kilang LNG darat melalui jaringan pipa. Kegiatan operasional dijadwalkan dimulai tahun 2019. Setelah proyek selesai, kilang Tangguh akan memiliki kapasitas total 11,4 mtpa.

Ada sebuah dokumen – Rencana Pengembangan II (PoD II) – yang menjabarkan cakupan penuh proyek yang meliputi pengembangan fasilitas dan pembangunan di bawah permukaan, kegiatan operasional, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (HSE), manajemen dampak sosial, pengadaan, keuangan, komersial dan pemasaran. POD II disusun oleh BP dan diserahkan ke regulator hulu Pemerintah Indonesia, SKK Migas, bulan Agustus 2012. PoD II disetujui bulan November 2012 dan merupakan tonggak penting terkait persetujuan Pemerintah Indonesia terhadap proyek. Tonggak penting lainnya adalah persetujuan AMDAL yang diharapkan terbit akhir bulan Juni 2014. AMDAL adalah izin lingkungan dan sosial dari pemerintah yang memuat komitmen untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial proyek.

Kunjungan dan rekomendasi TIAP

TIAP mengunjungi Tangguh dari tanggal 10 Maret hingga 18 Maret 2014. TIAP memfokuskan perhatiannya pada keamanan dan hak asasi manusia, tata kelola dan pengelolaan pendapatan, serta mempertimbangkan topik lain yang memiliki dampak tak langsung pada keamanan seperti program sosial Tangguh, ketenagakerjaan dan pelatihan masyarakat Papua, pengadaan, hubungan pemerintah dan urusan publik, serta lingkungan.

Tanggapan formal BP terhadap rekomendasi TIAP adalah sebagai berikut.

Rekomendasi: Keamanan dan hak asasi manusia

- 1. Sebagai bagian dari proses pembaruan JUKLAP (Petunjuk Lapangan), sosialisasi Program Keamanan Terintegrasi Berbasis Masyarakat (ICBS) harus ditingkatkan, terutama terkait perlunya pembatasan penangkapan ikan.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Sosialisasi ICBS dijalankan di kampung-kampung yang terkena dampak langsung (kampung DAV) setidaknya setahun sekali. Kami akan mengintensifkan kegiatan ini serta melibatkan kampung-kampung lain seiring peningkatan kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh di wilayah teluk.

Kami juga akan meningkatkan program ICBS agar lebih sistematis dengan pendekatan berbasis proses serta indikator kinerja utama yang jelas. Guna meningkatkan kinerja ICBS,

kami harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal seperti masyarakat dan aparat pemerintah. Mereka akan memberikan masukan dan umpan balik terkait harapan dan kontribusi mereka yang nantinya sangat penting untuk mengembangkan peta jalan program ICBS yang lebih sistematis dan efektif. Guna memastikan keberlanjutan program ICBS di tempat kami beroperasi, ICBS harus diperkenalkan kepada dan diterima oleh industri serupa di Papua pada umumnya, dan Papua Barat pada khususnya, serta didukung lembaga pemerintahan terkait.

2. Harus ada latihan tahunan bagi personel keamanan terkait penggunaan pentungan atau perangkat lain yang dapat menyebabkan cedera.

Tanggapan BP:

Kami setuju. Personel keamanan kami dan aparat kepolisian lokal telah mendapat pelatihan penggunaan pentungan dalam berbagai latihan keamanan seperti, Latihan Bersama, pelatihan swakarnya mengenai Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan HAM (VPSHR), dan pelatihan personel keamanan khusus.

Baru-baru ini kepolisian Papua mengabarkan bahwa akan ada peraturan kepolisian nasional yang melarang personel keamanan swasta menggunakan pentungan. Kami segera menarik pentungan dari personel keamanan kami dan akan menyesuaikan pelatihan kami.

3. Pangdam harus didorong untuk melanjutkan pelatihan hak asasi manusia bagi pasukan TNI yang akan dikerahkan ke Tangguh bila terjadi keadaan darurat.

Tanggapan BP:

Kami setuju. Pasukan TNI dan polisi di Bintuni mendapatkan pelatihan hak asasi manusia tahunan. Kami akan meneruskan pelatihan ini. Untuk memastikan keberlanjutan program ini, kami senantiasa berkomunikasi dengan Pangdam Papua dan Komandan Militer di Sorong.

4. BP harus bekerja sama dengan kepolisian untuk menjadikan latihan bersama tahunan sebagai simulasi yang lebih realistis. Latihan bersama juga harus terus digelar terpisah dari latihan hak asasi manusia atau kegiatan lain.

Tanggapan BP:

Latihan bersama bertujuan memberikan simulasi kegiatan bagi Polsek dan Polres terkait JUKLAP dan panduan hak asasi manusia melalui sebuah simulasi yang harus mereka selesaikan. Setelah latihan bersama, kami biasanya membahas pelajaran yang didapat dengan semua peserta dan mendiskusikan apa yang berjalan lancar dan apa yang kurang baik agar dapat melakukan peningkatan berkelanjutan. Sebelum mengadakan latihan bersama tahun ini, kami akan membahas agenda dan skenario simulasi dengan polisi guna mendapatkan umpan balik serta hasil latihan bersama yang lebih baik, sesuai tujuan dan hasil lebih realistis.

Tangguh akan meneruskan pelatihan hak asasi manusia swakarya terpisah dari latihan bersama seperti yang telah kami lakukan sejak memulai keduanya di tahun 2008. Dalam latihan bersama, akan ada kelas penyegaran hak asasi manusia. Ini hanya sebagai pengingat dan bukan pelatihan utama. Penyegaran ini bertujuan menyiapkan peserta untuk simulasi sebagai bagian latihan bersama.

5. Sistem pengaduan harus terus disosialisasikan baik di kampung yang terkena dampak atau di kalangan karyawan agar semua dapat memahami dan menggunakannya.

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami telah mengadakan sosialisasi sistem pengaduan di DAV secara rutin, termasuk di tahun 2013, dan berencana melanjutkannya di tahun-tahun mendatang.

- 6. BP harus membatasi dukungannya terhadap kehadiran personel polisi dan TNI di kampung pada komunikasi dan forum publik yang menginformasikan masyarakat mengenai keamanan, hak asasi manusia, dan ICBS.**

Tanggapan BP:

Kami setuju dan akan melakukannya. Tangguh akan mendukung kehadiran personel polisi dan TNI dalam komunikasi dan forum publik yang terkait langsung dengan fungsi formal mereka dalam ICBS.

- 7. BP harus memiliki rencana untuk mematikan kilang bila ada serangan maya yang berhasil tembus, dan mencegah pihak eksternal mengakses sistem operasinya.**

Tanggapan BP:

Kami telah memiliki prosedur untuk menangani situasi di mana sistem kendali kami tak dapat dijalankan (karena berbagai alasan termasuk serangan maya). Listrik akan dipadamkan dan kilang dimatikan. Tidak ada pihak eksternal yang dapat mengakses sistem operasi kilang. Sistem pengendalian untuk mencegah serangan sudah ada. Sebagai contoh, kami telah memasang *firewall* yang dijalankan dan dikontrol secara tersentralisasi. Informasi lain tak dapat disebutkan di sini demi alasan keamanan.

Rekomendasi: Program untuk kampung DAV dan Teluk Bintuni

- 1. CAP memberikan bantuan penting dan spesifik bagi kampung DAV. Meski CAP akan dihentikan tahun 2014, bantuan dana pengelolaan pengganti bagi kampung-kampung pesisir pantai yang terkena dampak harus berlanjut.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Sesuai AMDAL sekarang, program CAP di kampung DAV telah dilaksanakan selama 10 tahun, seperti yang dijanjikan dan akan dihentikan tahun 2014. CAP telah meningkatkan keterampilan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan kampung dengan menggunakan dana yang dialokasikan dari Tangguh. Dalam AMDAL baru, kami berencana menggunakan pendekatan berbeda yang difokuskan pada masyarakat asli di sekitar wilayah operasional Tangguh sebagai penerima program. Tangguh akan mengalokasikan pengganti kontrak pengelolaan dana untuk program-program berbasis masyarakat yang dapat diakses masyarakat. Tangguh juga akan meneruskan perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kampung hingga kabupaten.

- 2. Pemukiman, baik baru atau hasil renovasi, di kampung pesisir pantai utara harus jadi prioritas jangka panjang. BP harus mendukung program ini dengan memproduksi kayu dari pohon yang ditebang di kilang LNG.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Tangguh akan mendukung proyek renovasi pemukiman bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Kami saat ini tengah bekerja dengan konsultan dari LAPI-ITB terkait penilaian dan survei awal. Kami juga memulai proses formal dengan Pemerintah Daerah dan Pusat untuk mengambil kayu dari penebangan pohon TEP (Tangguh Expansion Project/ Proyek Pengembangan Tangguh) di saat yang tepat agar kayu tersebut dapat digunakan.

Kami telah membuat kemajuan terkait Restorasi Pemukiman Pesisir Pantai Utara melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Bupati Teluk Bintuni dan BP di Bintuni pada tanggal 5 Desember 2013; data dan informasi dasar untuk pra-studi kelayakan tengah dikumpulkan dari masyarakat di Weriagar; dan rapat pertama digelar di Jakarta tanggal 9 Mei 2014 guna menandai pelaksanaan studi kelayakan untuk program Restorasi Pemukiman Pesisir Pantai Utara. Rapat ini dihadiri Bupati serta pejabat senior Kabupaten Teluk Bintuni,

SKK Migas dan BP.

- 3. Elektrifikasi semua kampung DAV dan Babo harus jadi prioritas utama jangka pendek. Sampai saat PLN bisa memasang jaringan listrik, BP harus mendukung penyediaan listrik temporer berbasis diesel di Babo.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. BP berkoordinasi dengan PLN, Pemerintah Daerah dan UP4B untuk memantau perkembangan distribusi kabel transmisi ke kampung DAV di pesisir pantai selatan dan utara. Kami telah memulai upaya membantu Kabupaten Teluk Bintuni dengan meningkatkan pasokan listrik di wilayah Babo. Rencana jangka pendek kami adalah meminjamkan genset diesel yang akan dioperasikan dan dirawat oleh Kabupaten Teluk Bintuni. Kami harap genset ini dapat mulai menghasilkan listrik dalam beberapa bulan. Rencana jangka panjang kami adalah mendorong PLN untuk memperluas jangkauan listrik (di bawah Kesepakatan Pembelian Produksi Listrik antara PT PLN (Persero) dan Kontraktor KKS, yang ditandatangani pada 3 Desember 2013) untuk mencakup kampung-kampung di Distrik Babo. Untuk solusi jangka menengah dan panjang, kami akan bekerja sama dengan PLN dan Pemda Teluk Bintuni guna menjajaki jalan terbaik untuk memperluas jaringan listrik PLN dari gardu induk di dekat Tangguh hingga ke Babo.

- 4. Seiring perluasan program perawatan kesehatan, BP harus terlebih dahulu fokus meningkatkan kapasitas dan fasilitas di Babo, termasuk kemampuan perawatan gawat darurat, kapasitas personel jangka panjang, dan transportasi gawat darurat ke Bintuni atau tempat lain.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami telah mengidentifikasi beberapa tantangan terkait kesehatan di Babo dan Bintuni:

- Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kehamilan berisiko tinggi masih rendah. Dalam banyak kejadian, penduduk lokal merawat pasien kehamilan berisiko tinggi di pusat kesehatan atau bahkan di rumah, padahal seharusnya dibawa ke rumah sakit.
- Ketiadaan transportasi yang dapat diandalkan untuk merespons kasus gawat darurat dan rujukan karena ketiadaan pasokan bahan bakar dan buruknya perawatan perahu di Babo dan Bintuni.
- Puskesmas Babo, tempat personel dilatih, masih belum mampu menyediakan tingkat layanan yang diharapkan karena kurangnya rasa percaya diri tim, konstruksi fasilitas yang tengah berjalan, dan ketiadaan peralatan medis (beberapa di antaranya tengah dipesan).
- Manajemen dan layanan Rumah Sakit Bintuni masih belum dapat menangani kasus gawat darurat kehamilan dan neonatal.
- Dinas Kesehatan Kabupaten menyediakan dan mengelola Rumah Singgah di Bintuni. Rumah Singgah ini memberi penampungan sementara bagi wanita dengan kehamilan berisiko tinggi dari semua kampung yang berencana melahirkan di rumah sakit Bintuni. Tingkat hunian fasilitas ini tergolong rendah karena tak dikelola dengan baik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, Tangguh mendukung Puskesmas di Babo. Kami tengah meningkatkan kapasitas dan fasilitas Puskesmas Babo agar dapat menangani kasus Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan direncanakan selesai di triwulan 4 tahun 2014. Departemen Kesehatan Masyarakat Tangguh telah membahas transportasi gawat darurat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Kami dikabari bahwa meski Puskesmas Babo sudah memiliki perahu sejak beberapa tahun lalu, mesinnya rusak. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten baru-baru ini membeli mesin perahu baru untuk Puskesmas Babo dan juga menyediakan anggaran bahan bakar untuk transportasi gawat darurat ke Rumah Sakit Bintuni.

Tim kami di Distrik Babo yang dipimpin oleh Manajer Program MCH telah menjalin kerja sama dengan Puskesmas Babo, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan pemangku kepentingan lain di Babo. Bersama-sama mereka akan memastikan Puskesmas memiliki kapasitas dan fasilitas

untuk menangani kasus PONEB serta memastikan alat transportasi ke Bintuni terawat baik.

- 5. BP harus terus membangun kapasitas Dinas Pendidikan Kabupaten, mendukung pendidikan dasar di kampung yang terkena dampak, mendukung insentif guna mempertahankan guru andal untuk periode lebih lama, dan memfokuskan kemitraan pendidikan barunya pada pengembangan sekolah menengah unggulan.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Program pendidikan kami akan dilanjutkan untuk membantu Dinas Pendidikan Kabupaten menyediakan pendidikan dasar dan menengah di Teluk Bintuni. Hal ini mencakup: menyediakan guru dan rumah guru, infrastruktur dan fasilitas sekolah, beasiswa dan perangkat pendidikan, pengembangan kapasitas bagi Dinas Pendidikan dan mitra pelaksana lokal, pelatihan guru dan dukungan bagi sekolah unggulan, asrama, serta akses internet di sekolah.

- 6. BP harus mengatasi isu pengangkutan *stocking point* dan pembayaran dengan Indocater dan koperasi di kampung yang membeli dari masyarakat sebelum menjualnya ke Indocater. Jika tidak bisa, BP harus mencantumkan persyaratan untuk mengatasi keluhan ini dalam perpanjangan kontrak.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami akan menyediakan pembimbingan keuangan kepada koperasi. Kami juga akan memfasilitasi dialog antara Indocater dan koperasi serta antara anggota koperasi untuk menyelesaikan perselisihan terkait pengelolaan keuangan, pasokan, atau pembayaran. Termasuk di dalamnya adalah dialog antara Indocater dan koperasi mengenai persyaratan pembayaran kontrak guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan bersama demi memastikan perdagangan/transaksi bisnis berkelanjutan melalui program mata pencaharian. Persyaratan agar perusahaan *catering* menangani keluhan dari masyarakat dapat dicantumkan di kontrak dan Tangguh akan mendukung diskusi jika diperlukan.

- 7. Program pengembangan mata pencaharian dan pengelolaan ekonomi rumah tangga harus dilanjutkan untuk jangka panjang agar dapat menghasilkan produk-produk bernilai tambah. Visi jangka panjang mereka harus diarahkan ke penciptaan perekonomian rumah tangga yang mandiri dan berkelanjutan. Hal ini akan melindungi ekonomi rumah tangga dari dampak buruk dan kumulatif berbagai proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah ini.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Selain memperluas program mata pencaharian untuk meningkatkan pasar dan produktivitas bagi masyarakat asli, Tangguh juga terus menyediakan pelatihan ekonomi rumah tangga dan pengelolaan dana. Dalam pelatihan kami mempromosikan penggunaan pendapatan rumah tangga secara bijaksana dan kebiasaan menabung. Hal ini sangat penting karena kami berencana meningkatkan partisipasi lokal dalam menyediakan dukungan bagi Tangguh melalui Program Pengembangan Usaha Masyarakat Asli (IEDP) yang akan kian meningkatkan pendapatan mereka.

- 8. BP harus mendukung bengkel motor atau listrik di tiap kampung DAV jika dibutuhkan.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Tangguh telah mendukung pelatihan pendirian bengkel mesin di Taroy dan Saengga agar warga kampung dapat memperbaiki perahu motor dan generator listrik mereka sendiri. Kami akan mendukung masyarakat lokal yang tertarik dan memiliki potensi untuk mendirikan bengkel motor atau listrik di kampung lain. Hal ini akan jadi bagian dari IEDP yang menyediakan peluang bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan keterampilan dan bersaing memperebutkan peluang bisnis di tengah pertumbuhan industri di Bintuni dan Fakfak.

- 9. Sensus/survei dua tahun sekali yang tadinya dilakukan UGM harus diteruskan untuk memantau kemajuan program mata pencaharian. Untuk meningkatkan kegunaannya, sensus juga harus memonitor tren pengeluaran (konsumsi dan investasi) serta tabungan masyarakat.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Sensus/survei dua tahun sekali akan terus dilakukan untuk memonitor progres pembangunan sosial dan ekonomi di Bintuni termasuk hasil program mata pencaharian. Sensus sosial-ekonomi 2013 diperluas agar mencakup Fakfak. Kami juga akan menganalisis dan memonitor tren pengeluaran dan tabungan untuk mencari tahu apakah ada perubahan terkait cara masyarakat mengelola pendapatannya agar dapat lebih mandiri.

Rekomendasi: Ketenagakerjaan Masyarakat Papua, Pelatihan dan Pengadaan

- 1. BP harus menggalakkan program Teknisi dari Papua yang baru untuk Operasi & pemeliharaan secara agresif guna memenuhi kebutuhan perekrutan untuk kegiatan operasional saat ini dan di masa depan. BP juga harus mendukung pengembangan pusat keterampilan di Papua agar menghasilkan tenaga kerja Papua terampil guna memenuhi kebutuhan BP dan kontraktor konstruksi.**

Tanggapan BP:

Program pengembangan teknisi untuk operasi & pemeliharaan (Operation and Maintenance) Papua yang baru saat ini tengah berjalan. Program pengembangan ini akan makan waktu tiga tahun dan saat ini sedang dipersiapkan. Penilaian pasar untuk mengidentifikasi penyedia jasa pelatihan yang berkualitas sedang berjalan dan lelang tengah dilaksanakan. Targetnya adalah menjalankan layanan terpilih pada triwulan 4 tahun 2014. Para teknisi akan segera dipilih, diutamakan masyarakat asli di Bintuni dan Fakfak.

BP telah melaksanakan penilaian pasar untuk fasilitas pelatihan lokal di Papua dan mengidentifikasi beberapa sekolah menengah kejuruan potensial di Papua Barat yang memiliki fasilitas dan kurikulum yang baik untuk beberapa keahlian. Evaluasi lebih lanjut akan dijalankan guna mengidentifikasi keahlian yang diperlukan untuk kegiatan proyek dan kegiatan perawatan rutin.

- 2. BP harus terus menyediakan pelatihan bahasa Inggris bagi peserta yang membutuhkannya. BP harus mencari tahu apakah ada permintaan untuk program ini di Sorong, Fakfak atau lokasi lain.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami akan melanjutkan program pelatihan teknisi dan mengimplementasikan beberapa peningkatan untuk memastikan para teknisi memiliki pendidikan dan keterampilan yang tepat. Kami akan bermitra dengan pusat pelatihan keterampilan lokal di Papua yang dapat menyediakan pelatihan bagi teknisi *feeder pool*.

Kami akan memonitor tingkat kehadiran dan progres pelatihan bahasa Inggris di Manokwari dan Jayapura. Jika program ini berhasil, kami akan menawarkannya di lokasi lain (misalnya Sorong atau Fakfak). Tak hanya itu, BP telah membentuk tim pembelajaran hulu yang akan mendukung pelatihan bahasa Inggris yang efektif.

- 3. BP harus menjelaskan dan mendesak pencapaian target perekrutan masyarakat Papua oleh kontraktornya, termasuk denda atas kegagalan mencapai target yang telah disepakati.**

Tanggapan BP:

Sebagai bagian dari proses tender, Tangguh akan menjelaskan soal target perekrutan masyarakat Papua kepada kontraktor. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi Undangan Tender (Invitation to Tender) di mana komitmen AMDAL dilaksanakan. Kontrak akan memuat persyaratan khusus untuk mencapai target perekrutan masyarakat

Papua dan Tangguh akan mengimplementasikan pengukuran kinerja manajemen demi mendorong pencapaian target ini. Hal ini akan mencakup pelajaran yang didapat saat fase konstruksi kilang 1 and 2 Tangguh.

Kami juga akan memantau komitmen para kontraktor pada tahap operasi dalam merekrut dan mengembangkan tenaga kerja Papua mereka. Dalam dua tahun terakhir, kami berhasil mendorong kontraktor utama kami untuk memberikan dukungan lebih besar bagi pengembangan masyarakat Papua.

4. Etnis Papua, terutama dari wilayah Teluk Bintuni, harus diprioritaskan dalam semua program perekrutan dan pelatihan masyarakat Papua.

Tanggapan BP:

Sesuai AMDAL TEP, penerima program Tangguh akan mencakup masyarakat asli dari empat suku di kampung-kampung di sekitar Tangguh di Bintuni dan Fakfak. Ini merupakan perubahan fokus dalam AMDAL baru dari DAV (pendekatan wilayah) menjadi masyarakat asli. Definisi masyarakat asli bagi Tangguh nantinya tak hanya mencakup etnis Papua, tetapi juga non-etnis Papua yang telah tinggal dalam waktu yang lama di kampung dan diterima sebagai bagian masyarakat. Kami akan memprioritaskan dan menargetkan program perekrutan untuk etnis Papua dari empat suku di kampung-kampung sekitar. Meski demikian, kami tak dapat mengabaikan etnis non-Papua jika etnis Papua yang memenuhi syarat untuk direkrut jumlahnya kurang atau tidak ada.

5. BP harus memfokuskan program pemberdayaan usahanya pada barang dan jasa yang akan dibutuhkan saat konstruksi, serta mendorong kontraktor dan subkontraktor EPC-nya untuk mempergunakan perusahaan-perusahaan itu jika memungkinkan. BP harus membuat sistem prioritas bagi perusahaan yang memenuhi standar BP.

Tanggapan BP:

IEDP akan memfokuskan program pelatihan dan pemberdayaan usaha lokalnya guna memasok barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional Tangguh dan proyek pengembangannya, serta menciptakan peluang bagi usaha masyarakat asli di pasar lain di Papua Barat. Bekerja sama dengan Manajemen Pengadaan dan Rantai Suplai (Procurement Supply and Chain Management), IEDP akan mengembangkan kriteria tertentu guna menilai kompetensi usaha lokal dan kelayakannya untuk diprioritaskan oleh kontraktor Tangguh untuk menyuplai barang dan jasa.

Rekomendasi: Hubungan Pemerintah dan Urusan Publik

1. BP harus meneruskan hubungan positifnya dengan kepala daerah sepanjang periode konstruksi, termasuk kontak rutin dengan Pangdam dan Kapolda.

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami akan mempertahankan hubungan dengan pemimpin pemerintahan termasuk Pangdam dan Kapolda sepanjang konstruksi dan pasca konstruksi.

2. Tim urusan publik BP harus berinteraksi aktif dengan media-media utama, dan menggunakan perangkat media sosial untuk berkomunikasi lebih efektif.

Tanggapan BP:

Kami setuju untuk berinteraksi secara rutin dengan media-media utama di tingkat nasional dan lokal melalui berbagai jalur komunikasi yang sesuai yang dipilih didasarkan penilaian menyeluruh terkait risiko dan manfaat yang terlibat.

3. BP harus menonjolkan Tangguh sebagai pemimpin pengembangan masyarakat.

Tanggapan BP:

Kami yakin Pemerintah dan masyarakat harus menjadi pemimpin utama pengembangan masyarakat di Bintuni. Meski demikian, Tangguh tetap berkomitmen memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Daerah agar dapat memimpin pembangunan. Tangguh juga akan memfasilitasi keterlibatan dan dukungan lebih besar untuk pembangunan dari KKS lain yang beroperasi di wilayah Teluk Bintuni.

Tak hanya itu, kami meningkatkan kampanye kami melalui media nasional dan lokal terkait kontribusi Tangguh bagi pengembangan sosial di Bintuni, serta rencana kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas di Bintuni, Fakfak dan Papua Barat (sebagaimana disebutkan dalam AMDAL baru).

- 4. Forum pemangku kepentingan harus dilanjutkan tiap tahun di Teluk Bintuni untuk mendapatkan masukan dari Pemerintah, elemen masyarakat, dan pihak berkepentingan lain. BP juga harus meneruskan program kunjungan pemimpin kampung ke kilang LNG pada saat periode konstruksi.**

Tanggapan BP:

Dari 2012 hingga awal 2014, Tangguh berinteraksi secara intensif dengan pemangku kepentingan di masyarakat, pemerintah daerah, dan LSM sebagai bagian proses AMDAL TEP termasuk menggelar konsultasi publik di 62 kampung di Bintuni dan Fakfak. Tangguh juga mendukung dengar pendapat publik mengenai AMDAL di Bintuni di bulan Desember 2013 dan Februari 2014, dengan dipimpin oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang melibatkan lebih dari 200 peserta dari berbagai kampung, LSM, dan pemerintah daerah. Di masa depan, sebagaimana ditetapkan dalam AMDAL, Tangguh akan menggelar konsultasi rutin dengan pemerintah, masyarakat sipil, komunitas, media, dan pihak berkepentingan lain. Hubungan dengan pemangku kepentingan juga mencakup kunjungan pemimpin kampung dan pemerintah daerah ke kilang LNG.

Rekomendasi: Tata Kelola dan Transparansi

- 1. Dukungan jangka panjang untuk tata kelola yang lebih efektif dan transparansi di tingkat kabupaten sangat penting untuk keberhasilan program sosial Tangguh serta penggunaan pendapatan Tangguh dengan baik. Untuk memastikan implementasi yang efektif, BP harus menghindari jeda dan gangguan dalam program ini.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Program tata kelola sangat penting untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini. Kami akan membuat beberapa kontrak penghubung kecil untuk mencegah jeda dalam implementasi ketika kontrak utama pemerintah masih ditenderkan.

- 2. BP harus memfokuskan dukungannya untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat pada transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.**

Tanggapan BP:

Kami telah melaksanakan beberapa lokakarya untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat mengenai industri minyak dan gas serta bagi hasil. Kami juga mendukung EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) dengan melaksanakan seminar transparansi untuk pemerintah provinsi di tahun 2012. Untuk program di masa depan, kami akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan menawarkan pengembangan kapasitas bagi pejabatnya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

- 3. BP harus berkonsultasi dengan Bank Dunia atau lembaga lain yang mampu, serta Gubernur dan Bupati untuk menentukan apakah analisis pengeluaran terhadap anggaran mereka masing-masing dapat dilaksanakan.**

Kami akan berkonsultasi dengan Bupati dan Gubernur untuk mencari tahu apakah mereka mengizinkan Bank Dunia atau organisasi lain yang layak untuk melakukan analisis pengeluaran. Kami berencana melakukan ini dalam konsultasi kami dengan mereka mengenai program tata kelola untuk Kabupaten dan Provinsi.

Rekomendasi: Pengelolaan Pendapatan

- 1. BP harus mendukung penggunaan dana yang dialokasikan Perdasus dana bagi hasil sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah untuk pengakuan klaim adat yang sah terkait kepemilikan suku terhadap sumber daya alam.**

Tanggapan BP:

Kami setuju bahwa hak masyarakat adat harus dihormati. Saat Perdasus DBH disahkan, harus ada beberapa peraturan daerah tambahan yang harus diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Peraturan ini akan mengimplementasikan Perdasus serta menjalankan fungsi mereka untuk mengakui hak adat yang sah atas sumber daya alam menggunakan dana bagi hasil yang ditetapkan Perdasus. Tangguh akan menawarkan bantuan untuk mensponsori universitas lokal untuk menyediakan naskah akademik untuk peraturan daerah khusus tersebut.

- 2. BP harus membantu pembentukan dan pengembangan kapasitas pengelolaan badan yang akan mengurus dana perwalian untuk 10% bagi hasil pendapatan minyak dan gas yang dialokasikan Perdasus.**

Tanggapan BP:

Kami setuju bahwa dana perwalian harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah dan masyarakat harus memimpin pembentukan entitas tersebut dan Tangguh dapat memberikan bantuan. Selain itu, pengelolaan dana perwalian adat harus diserahkan pada institusi dana perwalian adat tersebut. Tangguh dapat menawarkan pengembangan kapasitas bagi institusi itu.

- 3. BP harus mendorong Gubernur dan Bupati untuk mengimplementasikan peraturan transparansi dan akuntabilitas dalam Perdasus DBH dengan mendukung analisis pengeluaran terhadap semua pendapatan sumber daya alam yang ditransfer ke provinsi.**

Tanggapan BP:

Seperti disebut di atas, kami akan berkonsultasi dengan Bupati dan Gubernur untuk menentukan apakah mereka bersedia melakukan analisis pengeluaran sebagai bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, transfer dana bagi hasil (DBH) ke provinsi digabungkan sebagai dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA), dalam kata lain tidak spesifik terkait Tangguh atau proyek lain yang berarti sulit melacak DBH Tangguh di tingkat Provinsi atau Kabupaten. Analisis pengeluaran dapat dilakukan terhadap anggaran di tingkat Provinsi atau Kabupaten atau terhadap DBH SDA serta bagian untuk pengakuan hak adat.

Rekomendasi: Lingkungan

- 1. BP harus mengalokasikan sumber daya untuk mengeliminasi ketidakpatuhan yang ada demi mencapai status hijau dan akhirnya emas dalam audit lingkungan hidup oleh**

KLH.

Tanggapan BP:

Tangguh akan berusaha keras untuk mencapai status Hijau di tahun 2015 dan Emas di tahun 2018. Tangguh berkomitmen untuk mematuhi semua persyaratan AMDAL dan menerapkan peraturan Pemerintah Indonesia mengenai lingkungan hidup. Kami telah mencapai tingkat kepatuhan Proper Biru dua kali berturut-turut – dalam audit Proper (audit yang dilaksanakan Pemerintah terhadap kepatuhan sosial dan lingkungan perusahaan dalam AMDAL) terhadap Tangguh tahun 2012, dan di audit kedua tahun 2013. Menurut panduan Proper KLH, sebuah perusahaan sebaiknya mencapai tingkat penilaian Biru tiga kali berturut-turut. Perusahaan juga harus memberikan bukti peningkatan untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki program lingkungan dan sosial (E&S) di luar persyaratan minimum agar layak mendapat nilai Hijau. Untuk mencapai nilai Emas, perusahaan harus mempertahankan nilai Hijau tiga tahun berturut-turut. Peringkat Emas merupakan pencapaian kepatuhan lingkungan tertinggi yang membutuhkan kepatuhan 100% di semua parameter tanpa terkecuali. Sejauh ini sudah ada dua perusahaan hidrokarbon dengan pengalaman operasional lebih dari 15 tahun yang telah mendapatkan nilai emas.

- 2. Survei sumber daya ikan, udang, dan kepiting di Teluk Bintuni serta pemantauan lingkungan hidup harus dilanjutkan agar dampak konstruksi dan kegiatan operasional di masa depan dapat diukur.**

Tanggapan BP:

Kami setuju. Kami telah melaksanakan pemantauan dan survei sumber daya ikan, udang dan kepiting di Teluk Bintuni secara rutin. Terkait studi dasar terhadap kontaminan sebelum konstruksi TEP, kami telah memasukan pemantauan dan survei tersebut sebagai bagian survei lingkungan dasar di tahun 2012 dan 2013.

- 3. BP bersama SKKMigas harus menjajaki berbagai opsi untuk memakai atau menguji teknologi baru guna mengurangi emisi CO₂.**

Tanggapan BP:

Gas umpang Tangguh dari sumur yang ada sekarang (di anjungan VR-A dan VR-B) mengandung 12% CO₂, sementara untuk Proyek Pengembangan Tangguh, estimasinya sekitar 15% CO₂. Hal ini berarti peningkatan produksi akan meningkatkan emisi CO₂. Kami setuju dengan rekomendasi untuk bekerja sama dengan SKK Migas guna memantau teknologi baru yang dapat dipertimbangkan sebagai opsi bagi emisi GHG di masa depan.

Apendiks A. Status rekomendasi TIAP

Rekomendasi TIAP dari kunjungan Juli 2012

Status Mei 2014

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
Keamanan dan hak asasi manusia	1. BP harus mewajibkan kontraktor keamanan swasta baru untuk mempertahankan petugas keamanan asli Papua yang memiliki kinerja baik	Kami setuju dan telah mewajibkan kontraktor keamanan baik dulu atau sekarang (sampai saat ini sudah tiga perusahaan berbeda) untuk mempertahankan petugas keamanan asli Papua yang sedang bekerja di posisi masing-masing.	Sesuai rencana. Kegiatan ini tengah dijalankan.
	2. BP harus bekerja sama dengan Genting Oil dan perusahaan lain yang melakukan eksplorasi di Teluk Bintuni, serta dengan pejabat pemerintah dan keamanan untuk mendorong penerapan prinsip ICBS dalam operasi keamanan mereka dan minimal memberikan pelatihan hak asasi manusia bagi personel polisi atau TNI yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan	Kami telah aktif mengajarkan pendekatan ICBS dan manfaatnya kepada Genting Oil yang saat ini tengah mengeksplorasi blok Kasuri yang berdekatan dengan Tangguh. Melalui kerja sama yang baik selama proses penelitian seismik mereka dalam perimeter Tangguh LNG, tim Genting mulai menerapkan prinsip ICBS. Genting pun mengindikasikan akan menerapkan ICBS sepenuhnya, karena mereka meminta Tangguh untuk berbagi pengalaman secara lebih intensif dalam hal perancangan dan implementasi ICBS untuk operasi pengeboran dan seismik mereka di masa depan. BPMIGAS mengakui hal ini dan Tangguh diminta memberikan penyuluhan lebih luas kepada PSC lain terutama yang beroperasi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Melalui inisiatif BPMIGAS (sekarang SKK Migas), kami juga memberitahukan keunggulan konsep ICBS kepada perusahaan-perusahaan besar lain yang beroperasi di wilayah Indonesia timur seperti Inpex. Sesi	Melalui SKK Migas, Tangguh terus berupaya memengaruhi semua pemangku kepentingan yang bekerja di Teluk Bintuni, terutama industri minyak dan gas, untuk menerapkan prinsip ICBS selama masa operasional mereka. Kami berhasil meyakinkan Genting untuk menggunakan perusahaan keamanan swasta dengan mempekerjakan beberapa personel keamanan dari kampung sekitar. Mereka tadinya menurunkan tentara saat kegiatan seismik. Kami juga akan terus melibatkan SKK Migas dan menggunakan saluran lain untuk memperkenalkan dan mempromosikan prinsip ICBS.

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
		<p>penyuluhan untuk perusahaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia juga telah dilaksanakan.</p> <p>Polda Papua secara konsisten mempromosikan ICBS dalam diskusinya dengan perusahaan lain yang beroperasi di Papua. Baru-baru ini, LSM lokal LP3BH, yang memberikan penyuluhan hukum dan HAM, menulis artikel di surat kabar lokal untuk mempromosikan penerapan ICBS oleh semua perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam di Papua.</p> <p>Jika tindak pengamanan perusahaan lain mengancam operasi kami di masa depan, kami akan mempromosikan manfaat ICBS dengan lebih gencar melalui lembaga pemerintah yang relevan termasuk BPMIGAS dan kepolisian.</p>	
	<p>3. Latihan bersama tahunan sesuai dengan kesepakatan dengan kepolisian harus dilakukan tiap tahun. Jika latihan penuh tak dapat dilaksanakan, BP harus bekerja sama dengan kepolisian dan TNI untuk menjadwalkan latihan yang lebih terbatas.</p>	<p>Kami setuju. Kami berkomitmen menerapkan seluruh aspek ICBS, termasuk rekomendasi latihan bersama tersebut. Jika tidak memungkinkan bagi kepolisian dan militer Jayapura untuk berpartisipasi dalam latihan penuh, kami akan menggelar latihan skala lebih kecil yang melibatkan kepolisian kecamatan dan kabupaten.</p> <p>Untuk tahun ini, kami sudah menjadwalkan latihan skala penuh di bulan November 2012. Pertemuan perdana telah diselenggarakan oleh BPMIGAS di Jakarta pada tanggal 23 Oktober dihadiri oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Nasional Kepolisian (Dirpamobvit) dan BP.</p>	<p>Sesuai rencana.</p> <p>Latihan bersama (JE) tahunan dilaksanakan sesuai jadwal tanggal 19-22 November 2012 diikuti 130 peserta termasuk aparat kepolisian dan personel keamanan Tangguh.</p> <p>Di tahun 2013, JE dilaksanakan di Babo tanggal 17-21 November diikuti 127 peserta dari kepolisian setempat dan personel keamanan Tangguh. LSM lokal seperti LP3BH dan Elsham, hadir sebagai pengamat.</p>
	<p>4. ICRC atau organisasi pelatihan hak asasi manusia profesional lain sebaiknya dilibatkan secara berkala untuk membarui program pelatihan bagi tenaga keamanan dan memastikan program tersebut sesuai perkembangan zaman dan lengkap.</p>	<p>Kami setuju. LP3BH, sebuah LSM lokal di bidang penyuluhan dan pelatihan hukum dan hak asasi manusia, kini membantu kami mengadakan kursus penyegaran bagi personel keamanan di Papua.</p>	<p>Pelatihan hak asasi manusia dilaksanakan tiap tahun agar semua personel memahami dan mengetahui implementasi prinsip sukarela keamanan dan HAM. Di tahun 2013, pelatihan dilaksanakan di Kota Bintuni tanggal 2-6 September, melibatkan 50 personel dari</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
			<p>TNI AD Kompi Senapan E/752. Pelatihan lebih lanjut dilaksanakan tanggal 23-27 September, melibatkan 30 bintara kepolisian lokal. LSM lokal seperti OMNAS HAM Papua dan LP3BH Manokwari hadir sebagai pengamat.</p>
<p>Hubungan Pemerintah & Urusan publik</p>	<p>5. Kantor penghubung yang lebih kuat harus didirikan di Manokwari untuk mempertahankan hubungan dengan Gubernur, pejabat senior, DPRD dan MRP serta untuk memberikan informasi kepada mereka semua mengenai program dan isu di Tangguh. Selain itu pejabat senior BP Indonesia harus mengunjungi Manokwari ketika mengunjungi Tangguh; Gubernur dan pejabat senior DPRD harus diundang ke Tangguh dan Gubernur harus diundang untuk bertemu pejabat senior BP ketika mengunjungi Jakarta.</p>	<p>Kami setuju. Kami tengah memperkuat hubungan kami dengan Gubernur, DPR-PB dan MRP, dengan mewajibkan koordinator penghubung senior kami untuk menghabiskan 30% waktunya di Manokwari dan memberikan kabar terbaru mengenai operasi dan rencana pengembangan Tangguh kepada para pejabat dan instansi tersebut. Kami juga mempererat hubungan sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembahasan Perdasus mengenai dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas. Kami bertekad mempertahankan hubungan baik yang telah terbina dengan Pemerintah Papua Barat dan pemangku kepentingan lain sesuai rekomendasi TIAP.</p>	<p>Seorang koordinator TLO telah diangkat dan bertanggung jawab menjaga komunikasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan utama di Manokwari, termasuk Gubernur, MRP dan DPR PB. Perannya adalah untuk menciptakan suasana kondusif guna memberi kabar terkini mengenai kegiatan proyek Tangguh, serta menanggapi masalah eksternal, misalnya rencana listrik.</p> <p>Komunikasi dan konsultasi komprehensif juga dilaksanakan terkait Proyek Pengembangan Tangguh dan AMDAL, serta saat penyusunan Perdasus DBH dengan lembaga legislatif di Papua Barat.</p>
	<p>6. Tangguh harus memperkuat citranya di Teluk Bintuni, Papua dan di tingkat nasional. Melalui kerja sama dengan BPMigas, misalnya, BP dapat mengaitkan nama Tangguh dengan pemasangan jaringan listrik baru di Teluk Bintuni. Beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa lokal di UNIPA dan universitas lain dapat dinamakan sebagai beasiswa Tangguh. BP atau Tangguh juga dapat menyumbangkan peralatan penting kepada rumah sakit yang baru dibangun, atau memberi bantuan lain yang dapat langsung diasosiasikan dengan Tangguh.</p>	<p>Kami menyambut baik dan memahami pemikiran di balik rekomendasi ini. Kami akan merancang strategi hubungan masyarakat untuk memperkuat profil Tangguh dan memastikan upaya kami di tengah masyarakat lokal mendapat pengakuan dengan cara-cara yang memungkinkan bagi kami untuk mengelola ekspektasi eksternal.</p>	<p>Beberapa inisiatif telah dijalankan untuk memastikan bahwa kontribusi Tangguh terlihat bagi masyarakat di Teluk Bintuni. Program yang baru-baru ini berhasil dijalankan adalah program elektrifikasi Teluk Bintuni. BP berkomitmen memasok dan menjual listrik yang dihasilkan dari Kilang LNG Tangguh ke PLN. Kelebihan listrik yang dihasilkan merupakan bukti program efisiensi pembangkit listrik yang dijalankan Tangguh. Dalam fase pertama, Tangguh berkomitmen memasok dan menjual hingga 4 MW ke PLN yang akan mendistribusikannya ke konsumen di Kota Bintuni dan wilayah sekitarnya. Peresmian elektrifikasi Kota Bintuni dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2014, dihadiri oleh Gubernur Papua Barat dan Bupati Teluk Bintuni. Keduanya sangat mengapresiasi Tangguh yang memasok listrik tersebut. Masyarakat lokal menyambut baik dan menikmati listrik permanen 24 jam di wilayah tersebut untuk</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
			<p>pertama kalinya. Hal ini menjadikan Teluk Bintuni sebagai kota pertama di wilayah Papua yang memiliki listrik permanen 24 jam. Tangguh merilis siaran pers yang dimuat di surat kabar nasional yaitu, KOMPAS. Fase kedua program elektrifikasi akan memasok 4 MW tambahan hasil kegiatan efisiensi yang dijalankan Tangguh dan perluasan jaringan distribusi listrik oleh PLN. Fase kedua program elektrifikasi bertujuan untuk melaksanakan elektrifikasi bagi DAV di Pesisir Pantai Selatan Teluk Bintuni.</p> <p>Tangguh juga terus meningkatkan kualitas rumah sakit di Kota Bintuni. Rumah sakit itu akan menjadi pusat layanan kesehatan di wilayah tersebut. Di tahun 2013, Tangguh menyumbangkan peralatan pemeriksaan medis (MCU) bernilai total USD14,000. Saat ini rumah sakit itu telah berfungsi dan memberikan layanan MCU bagi kontraktor dan karyawan Tangguh serta masyarakat di sekitar Teluk Bintuni sejak Februari 2013. Rumah sakit itu memiliki kapasitas untuk memberikan layanan MCU bagi 15 pasien per hari. Dalam periode Februari-Desember 2013, sebanyak 243 karyawan telah menggunakan layanan MCU di rumah sakit Bintuni.</p> <p>Proyek bermanfaat nyata lain yang dijalankan Tangguh adalah pengembangan transportasi umum darat bagi Kota Bintuni melalui YPTB (Yayasan Bintuni). Penilaian komprehensif dan studi banding transportasi umum dilaksanakan tahun 2012 dan 2013 oleh konsultan independen dari LAPI ITB dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penilaian tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk pengambilan keputusan dan tindakan lebih lanjut. Program beasiswa terus dijalankan untuk memberi kesempatan bagi pelajar lokal untuk mengakses pendidikan lebih lanjut. Di tahun 2013 ada 79 pelajar</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
			<p>lokal (kampung DAV dan Bintuni) di tingkat SMA dan perguruan tinggi yang menerima beasiswa dari Tangguh. Sejak 2008, Tangguh telah memberikan beasiswa kepada 379 pelajar di tingkat SMA dan perguruan tinggi.</p> <p>Saat mengembangkan AMDAL baru, Tangguh telah mengidentifikasi beberapa hasil yang lebih nyata dan jelas bagi masyarakat di Teluk Bintuni. Hal ini akan membantu memenuhi harapan masyarakat serta membangun kepercayaan melalui Tangguh.</p>
	<p>7. Kegiatan urusan publik di Jakarta harus ditingkatkan. Penyediaan informasi bagi media dan pejabat senior pemerintah harus digiatkan. Bila perlu, pejabat senior pemerintah sebaiknya diundang ke Tangguh.</p>	<p>Kami telah meningkatkan kegiatan hubungan masyarakat seiring pengembangan Tangguh. Kami sudah menjadwalkan kunjungan figur-figur penting ke Tangguh tahun ini, termasuk perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Komisi 7 DPR bidang Energi dan Pertambangan, Badan Intelijen Negara, Kepala dan Deputi BPMIGAS, UP4B, UKP4, serta beberapa pejabat pemerintah lokal. Kami juga memanfaatkan hal-hal yang kami pelajari dari perusahaan lain untuk memperkuat citra Tangguh di mata media dan pejabat senior pemerintah.</p>	<p>Tim Tangguh yang dipimpin oleh Tim Hubungan Eksternal Pemerintah terus berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal. Program elektrifikasi bersama kantor pusat PLN turut meningkatkan interaksi BP dengan pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>Hubungan baik telah terjalin dengan para personel media lokal dan internasional. Sesuai komitmen BP untuk membangun kapasitas jurnalis lokal, pelatihan dan lokakarya untuk media lokal telah dilaksanakan di Jakarta dan Manokwari di tahun 2013.</p> <p>Muatan pelatihan mencakup berbagi informasi mengenai kabar terkini Tangguh dan program sosialnya. Selain itu, melalui kerja sama dengan SKK Migas dan perusahaan minyak lain, BP mendukung kunjungan media ke wilayah operasional minyak dan gas di Sorong serta memberikan ulasan mengenai kegiatan minyak dan gas. Sebanyak 14 media (delapan nasional dan enam lokal) berpartisipasi dalam kunjungan ini. Kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran media lokal mengenai</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
			<p>kompleksitas proyek minyak dan gas serta meminimalkan pemberitaan negatif tentang Tangguh.</p> <p>Terkait artikel Tangguh yang dimuat majalah TEMPO di bulan Februari 2014, BP telah mengirim tanggapan ke TEMPO untuk membantah dan mengklarifikasi fakta di artikel tersebut. BP juga berkomunikasi dengan media lain seperti Jakarta Post dan Metro TV untuk memberikan perspektif positif terhadap Tangguh. Kami akan terus membangun citra positif Tangguh dan BP berlandaskan fakta.</p>
	<p>8. Setiap tahun BP harus menggelar pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan di Teluk Bintuni yang melibatkan Pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lain. BP harus melaporkan program-program Tangguh dan meminta masukan dari semua pihak mengenai kinerja dan rencana BP di masa depan.</p>	<p>Kami berinteraksi dengan pemangku kepentingan di Bintuni melalui pendekatan yang lebih terfokus melalui pertemuan-pertemuan skala kecil dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, media, penduduk setempat dan pihak terkait lain. Tahun ini kami menggelar berbagai pertemuan dengan kelompok-kelompok tersebut sebagai bagian dari proses konsultasi publik untuk membahas rencana proyek Pengembangan Tangguh.</p>	<p>Sebagian besar pertemuan dengan pemangku kepentingan lokal telah dijadwalkan untuk konsultasi publik dan dengar pendapat AMDAL melibatkan perwakilan masyarakat dari Bintuni dan Fakfak serta Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Papua Barat. Dua kali proses dengar pendapat publik telah dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dan Februari 2014 oleh KLH untuk mempresentasikan komitmen AMDAL dan mendapatkan persetujuan masyarakat lokal terhadap AMDAL.</p> <p>Selain itu, pertemuan dengan pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara rutin. Forum hubungan masyarakat untuk perusahaan minyak dan gas di Papua dan Maluku dibentuk oleh SKK Migas. Forum ini bertujuan untuk menjalin dan mempertahankan komunikasi terkait isu-isu di antara perusahaan serta membangun hubungan dengan pihak-pihak eksternal di wilayah tersebut.</p> <p>Di sisi lain, koordinasi rutin dengan Pemerintah Daerah juga dilaksanakan termasuk perencanaan dan evaluasi program-program sosial Tangguh.</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
Program sosial	<p>9. BP harus bekerja sama dengan YSA untuk memfokuskan peningkatan kualitas perawatan malaria dan pencegahan HIV di kampung-kampung yang kedatangan banyak pekerja asing akibat kegiatan eksplorasi perusahaan lain di wilayah tersebut.</p>	<p>Kami setuju. Kami bekerja sama dengan YSA dan Dinas Kesehatan Bintuni untuk menanggulangi risiko kesehatan yang diakibatkan kedatangan para pekerja asing yang dipekerjakan perusahaan Lain.</p>	<p>Tanggung melanjutkan kolaborasinya dalam hal program kesehatan dasar dengan YSA mencakup pengendalian malaria dan HIV di kampung DAV serta di wilayah Bintuni yang lebih luas. Kami menyediakan bantuan teknis bagi petugas Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten dan fasilitas kesehatan dengan menerapkan pengawasan aktif, program kesadaran dan konsultasi serta perawatan dini terhadap orang yang didiagnosis menderita malaria atau HIV positif. Program kolaborasi dengan perusahaan swasta di Teluk Bintuni telah dikembangkan untuk mencari peluang program kerja sama untuk meningkatkan upaya ini. Saat ini, beberapa perusahaan telah menerapkan program pengendalian malaria di wilayah kerja mereka.</p> <p>Untuk memerangi penyebaran HIV AIDS di wilayah Teluk Bintuni, tim PEH mendukung komisi AIDS lokal untuk mengembangkan program komprehensif termasuk kemitraan dengan sektor eksternal serta donor internasional seperti yayasan CHAI, didukung oleh USAID dan Global Fund. Sebagai bagian dari program pencegahan HIV AIDS, sebuah klinik rujukan untuk STI dan VCT telah didirikan di RS Teluk Bintuni. Klinik ini menyediakan layanan konsultasi gratis dan jasa tes agar masyarakat tahu status HIV mereka. Klinik ini juga mempromosikan gaya hidup sehat.</p>
	<p>10. BP harus berkonsultasi dengan Bupati untuk mencari tahu apakah ada peningkatan penting atau kebutuhan lain yang dapat disediakan Tangguh bagi rumah sakit Bintuni yang baru.</p>	<p>Kami telah menyediakan cetak biru sistem manajemen dan meminta agar rumah sakit tersebut melakukan pemeriksaan medis rutin (MCU) bagi karyawan Tangguh dan kontraktor. Kami akan terus berinteraksi dengan Bupati guna mencari tahu apakah ada kebutuhan lain untuk meningkatkan layanan rumah sakit itu serta bekerja sama dengan perusahaan lain yang beroperasi di Bintuni untuk mengoordinasikan dukungan kami di masa depan.</p>	<p>Tim PEH berdiskusi secara komprehensif dengan Bupati dan pejabat kesehatan kabupaten untuk memperkuat rumah sakit Bintuni. Baru-baru ini, rencana strategis lima tahun untuk mengembangkan rumah sakit telah disusun, termasuk cara meningkatkan kualitas. Rumah sakit Bintuni akan dikembangkan sebagai pusat layanan kesehatan utama di wilayah ini dan digolongkan sebagai jenis F. Karena itu kami akan terus mendukung rumah sakit itu serta layanan dan manajemennya agar dapat</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
			<p>memenuhi standar nasional.</p> <p>Tanggung telah menyediakan peralatan rumah sakit untuk program MCU senilai Rp1,4 miliar (USD140,000).</p>
	<p>11. BP harus bekerja sama dengan British Council untuk menciptakan tolak ukur, pengawasan atau metode evaluasi tambahan guna memastikan integritas hasil ujian pendidikan di Teluk Bintuni.</p>	<p>Kami setuju. Ke depannya, kami akan berhubungan langsung dengan pihak sekolah untuk menilai integritas dan validitas ujian nasional. Untuk mendukung peningkatan standar pendidikan, kami kami telah menjalankan beberapa program yang difokuskan kepada pendidikan dasar: pelatihan dan pembekalan guru; peningkatan kualitas infrastruktur; pengembangan kurikulum; dan peningkatan kualitas perangkat dan sistem. Kami hendak mengukur kemajuan secara lebih efektif dengan menyertakan indikator-indikator utama (misalnya rasio guru-murid dan kompetensi guru) dalam survei ekonomi dua tahunan sekali dan laporan evaluasi kami. Kami akan menjalankan peningkatan-peningkatan ini melalui British Council (BC) sebagai mitra pelaksana kami atau lembaga pendidikan lain.</p>	<p>Program pendidikan kami melanjutkan upaya untuk memonitor kualitas pendidikan. Selain menggunakan tingkat kelulusan siswa, program mengevaluasi proses pembelajaran serta menerapkan standar kurikulum nasional di sekolah-sekolah.</p> <p>Survei kualitatif terhadap kualitas pendidikan di wilayah Teluk Bintuni akan dijalankan tahun ini oleh konsultan independen dari UNCEN. Hasilnya akan digunakan untuk mengetahui kemampuan sekolah-sekolah dalam mematuhi standar nasional serta kualitas pendidikan di wilayah ini.</p> <p>Sementara itu, sensus sosial 2013 memberikan pemahaman yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi program pendidikan.</p>
	<p>12. BP harus mencari peluang untuk menambah rantai nilai bagi bisnis di Teluk Bintuni dalam program- program usaha mikro dan pengadaan yang dijalanannya serta mendukung inisiatif Bupati untuk sistem transportasi terintegrasi sebagai salah satu cara untuk mendapatkan peluang-peluang tersebut.</p>	<p>Kami setuju dan tengah mengembangkan program mata pencaharian sesuai dengan rekomendasi ini. Contoh spesifiknya adalah bengkel sepeda dan gerai di Babo yang menjual produk yang dihasilkan DAV. Pemasangan listrik di tahun 2013 juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong munculnya usaha mikro dan bisnis komersial baru. Saat ini, tujuh <i>stocking point</i> telah didirikan dan beroperasi di Bintuni, Arguni, Tanah Merah, Babo, Tofoy, Taroy dan Weriagar guna mengumpulkan produk masyarakat untuk disuplai ke jasadoga Tangguh. Titik penyimpanan baru juga tengah dibangun di Onar. Di bulan Januari-September 2012, total 268 ton buah-buahan, sayuran, ikan, kepiting dan udang senilai Rp6,7 miliar telah dikirim ke <i>catering</i> Tangguh LNG. BP tengah mengkaji</p>	<p>Sesuai rencana.</p> <p>Program ini masih difokuskan untuk membantu pengembangan produk pertanian dan perikanan guna menjaga suplai ke jasadoga Tangguh dan pasar lokal. Total suplai sayuran, buah, ikan dan udang Antara tahun 2008 dan Desember 2013 adalah 1,107 ton atau setara US\$3,2 juta. Untuk mengoptimalkan distribusi produk-produk kampung DAV, beberapa inisiatif telah dibuat termasuk pengembangan pasar lokal melalui sebuah gerai di Kampung Babo dan Kota Bintuni. Pengembangan pasar juga telah mencapai wilayah Makassar dan Sorong.</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
		<p>pasar alternatif seperti Bintuni, Sorong dan Masassar untuk memperluas peluang.</p>	<p>Bengkel sepeda dan mesin di beberapa kampung berfungsi dan mendapat pesanan dari departemen perawatan Tangguh dan masyarakat lokal. Sebuah kesepakatan dibuat antara departemen perawatan LNG Tangguh dan bengkel-bengkel tersebut. Usaha ini umumnya dikelola masyarakat adat yang mendapat pelatihan intensif di bidang keterampilan teknis dan manajemen.</p> <p>Hasil pemantauan saat ini menunjukkan bahwa bengkel sepeda memiliki kapasitas untuk memperbaiki rata-rata 15 sepeda (dengan total pendapatan Rp30 juta) per bulan.</p> <p>Program baru Pengembangan Usaha Masyarakat Asli telah dibentuk untuk mengembangkan perusahaan lokal agar mereka dapat menyediakan jasa pendukung bagi kegiatan operasional Tangguh.</p>
	<p>13. Sensus kampung DAV yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali harus dilanjutkan sepanjang operasi Tangguh dan, sebagai pembanding dan untuk mendapat gambaran lebih luas, harus terus mengikutsertakan sampel kampung non-DAV di tiap sensus.</p>	<p>Kami setuju. Kami telah menunjuk lembaga-lembaga independen untuk melaksanakan sensus ekonomi dan sosial dua tahun sekali sesuai komitmen kami dalam buku panduan ISP-2. Sensus yang berikutnya akan terus melibatkan DAV dan sampel kampung non-DAV, sebagai kelompok pembanding.</p>	<p>Sesuai rencana.</p> <p>Sensus dan survei independen terakhir dilakukan di pengujung 2013 bekerja sama dengan PSKK UGM. Data dikumpulkan dari 59 kampung di sekitar proyek Tangguh termasuk wilayah pengembangan.</p> <p>Sensus/survei tersebut mencakup isu-isu sosial dan ekonomi agar dapat memahami dinamika populasi di wilayah itu dan kini hasilnya telah tersedia.</p>
	<p>14. BP harus bekerja sama dengan Bupati untuk meningkatkan dan menggiatkan Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni (YPTB), bisa jadi dengan memberikan dana perwalian guna mendukung yayasan tersebut dan kebutuhan masyarakat asli lainnya.</p>	<p>Kami setuju. Kami akan bekerja sama dengan Bupati untuk memperpanjang MoU dengan YPTB, memberikannya peran lebih substansial dalam pembangunan infrastruktur di Teluk Bintuni, termasuk persiapan awal layanan transportasi publik serta perbaikan tata kelola YPTB. Kami akan memasukkan pembentukan dana perwalian dalam perpanjangan MoU.</p>	<p>Perpanjangan MoU untuk program YPTB dilaksanakan di bulan Juni 2013. Bupati dan BP sepakat menambahkan satu tahun kegiatan untuk YPTB. BP akan menyediakan dana total USD1,3 juta guna mendukung rencana ini. YPTB telah menjalankan programnya termasuk mengembangkan infrastruktur umum di pesisir utara.</p> <p>Tak hanya itu, penilaian transportasi umum juga telah</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
			<p>diselesaikan bekerja sama dengan LAPI ITB. Hasilnya sudah dipresentasikan kepada Bupati dan pemangku kepentingan lokal untuk pengambilan keputusan dan tindakan lebih lanjut.</p> <p>Audit independen terhadap kegiatan dan laporan keuangan YTPB dilaksanakan tahun 2012. Hasilnya memuaskan.</p>
	<p>15. BP harus bekerja sama dengan PLN dan UP4B untuk memastikan proyek elektrifikasi Teluk Bintuni mencakup area seluas-luasnya dan dapat beroperasi secepatnya.</p>	<p>Proyek pasokan listrik pertama ke Bintuni akan mengalirkan 4-8MW listrik untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Infrastruktur, kapasitas dan perencanaan PLN akan menentukan jaringan distribusi listrik tersebut. Dalam Kesepakatan Pembelian Produksi Pertambangan (SOA), kami menyebutkan bahwa Kampung DAV, Kota Bintuni dan Babo harus diutamakan untuk mendapatkan pasokan listrik. PLN berkomitmen mengalirkan listrik pada Februari 2013 dan Tangguh telah menyiapkan fasilitas untuk mentransmisikan listrik yang akan siap sebelumnya. Kami akan terus berkoordinasi dengan PLN dan UP4B untuk memantau perkembangan proyek ini.</p>	<p>BP bekerja sama dengan PLN, Pemerintah Daerah dan UP4B untuk memantau perkembangan proyek. Fase pertama proyek untuk mengalirkan listrik ke Kota Bintuni telah selesai. Kota Bintuni mulai menggunakan listrik Tangguh sejak Februari 2014. Fase kedua proyek elektrifikasi untuk kampung DAV di Teluk Bintuni berlanjut sesuai Kesepakatan Pembelian Listrik antara PT PLN dan Kontraktor Kerja Sama Tangguh yang ditandatangani 3 Desember 2013.</p>
<p>Ketenagakerjaan dan Pelatihan Masyarakat Papua</p>	<p>16. BP harus menyediakan pekerjaan di luar Tangguh untuk pekerja dari kampung DAV yang direlokasi sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko. Pekerja yang diberhentikan harus diberikan pesangon dan masyarakat Papua harus diutamakan untuk dipekerjakan kembali.</p>	<p>Untuk memastikan manajemen risiko berkelanjutan, jumlah karyawan yang dipekerjakan di kilang Tangguh akan didasarkan pada kebutuhan operasional. Kami tengah mencari cara untuk mempekerjakan kembali pekerja (jika dibutuhkan) untuk posisi lain di luar kilang LNG sebagai bagian dari upaya menyediakan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat kampung DAV. Sebagai contoh, beberapa petugas keamanan telah dipekerjakan kembali dan direlokasi untuk melaksanakan tugas ICBS di berbagai kampung berdasarkan rotasi.</p> <p>Jika ada karyawan yang diberhentikan di masa</p>	<p>Proyek Tangguh meneruskan komitmennya untuk menyediakan peluang lebih besar bagi penduduk kampung DAV untuk bekerja di Tangguh termasuk bekerja melalui kontraktor. Kami telah menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan antara persyaratan kompetensi dan risiko manajemen dengan peluang pengembangan masyarakat Papua melalui kontraktor kami. Peningkatan persyaratan keterampilan untuk para pekerja mungkin dapat berakibat pada penggantian pekerja dari kampung DAV dengan pekerja non-Papua. Kami telah turun tangan agar kontraktor setuju mengirim pekerja dari kampung DAV untuk dilatih, sementara pekerja non-Papua akan dipekerjakan selagi pekerja lokal menjalani pelatihan.</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
		<p>depan, pesangon dan tunjangan lain akan diberikan sesuai ketentuan hukum, sementara karyawan yang dipekerjakan kembali di masa depan akan dipilih berdasarkan kemampuan atau kewarganegaraan/etnis jika lowongan tersebut termasuk posisi yang yang disediakan bagi asli Papua. Posisi yang tidak membutuhkan keterampilan atau sedikit keterampilan akan diperuntukkan bagi masyarakat asli Papua dari kampung DAV dan wilayah Kepala Burung; beberapa posisi semi terampil dan posisi yang membutuhkan keterampilan juga akan diprioritaskan bagi masyarakat asli Papua.</p>	<p>Program baru untuk pengembangan usaha masyarakat asli telah dimulai guna menciptakan peluang bagi pengusaha lokal untuk menyediakan layanan pendukung di mana masyarakat lokal dapat dipekerjakan.</p> <p>Tak hanya itu, program Pengembangan Tangguh akan menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal terutama masyarakat asli, selama masa konstruksi.</p>
	<p>17. Pelatihan bahasa Inggris bagi personel asli Papua di kilang LNG sangat berguna bagi penduduk asli Papua yang ingin maju. BP harus melanjutkan program ini dan mengatur kelas untuk mengakomodasi jadwal kerja panjang yang harus dipenuhi para teknisi tersebut.</p>	<p>Kami setuju. Program pelatihan ini telah membantu teknisi dan pekerja lain di kilang. Sesuai komitmen kami terhadap pengembangan lokal, kami kini juga menyediakan kursus bahasa Inggris bagi pegawai Magang.</p> <p>Kontrak baru untuk memperpanjang program tersebut di seluruh kilang telah dibuat. BP juga berupaya lebih keras meningkatkan jumlah peserta dari kalangan teknisi dengan menggelar kelas di lokasi yang mudah dijangkau pada jam-jam yang tetap memungkinkan mereka memaksimalkan waktu istirahat.</p> <p>Beberapa peningkatan lain akan dilaksanakan mulai Januari 2013 seperti komitmen manajer lini untuk menominasikan karyawan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris, jadwal pelatihan tahunan yang sinkron dengan pola Rota dan waktu kerja serta rangkaian turnamen bahasa Inggris untuk memotivasi Peserta.</p>	<p>Setelah melalui analisis menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa kursus bahasa Inggris di kilang tidak efektif. Tingkat kehadiran dan pemanfaatan pelatih yang rendah disebabkan karena peserta segan menghadiri kursus setelah jam kerja. Pendekatan baru kini tengah dikembangkan. BP telah menandatangani MoU dengan universitas di Manokwari dan Jayapura untuk memberikan kursus bahasa Inggris pada karyawan BP dan TPC. Sebanyak 31 orang berpartisipasi dalam pelatihan di Manokwari dan 79 di Jayapura. Tak hanya itu, peserta di Jayapura juga mendapat pelatihan komputer. Progres dan efektivitas program ini tengah dikaji.</p>
	<p>18. Perekrutan, retensi dan pemajuan etnis Papua harus tetap menjadi prioritas. BP harus menyediakan peluang dengan tingkat</p>	<p>Kami setuju bahwa perekrutan etnis Papua harus diprioritaskan, tapi kami yakin bahwa retensi dan pengembangan karyawan harus didasarkan pada kemampuan. Kami telah mempublikasikan</p>	<p>Sejak tahun 2009 hingga Desember 2013, sebanyak 410 pekerja Papua menduduki posisi penyelia dan kepala tim di bidang Operasional, WFM, CRP,</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
	<p>keterampilan lebih tinggi dan menawarkan pelatihan kepada karyawan Tangguh dari Papua dan Bintuni yang menunjukkan tekad untuk sukses di Tangguh.</p>	<p>lowongan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi secara lebih efektif di kilang dan berbagai universitas.</p> <p>Upaya kami untuk merekrut dan memajukan masyarakat Papua dan Bintuni ke peran yang membutuhkan keterampilan tinggi difokuskan pada tiga tindakan spesifik: hanya merekrut masyarakat Papua untuk bekerja sebagai Teknisi Operasional (sejak Gelombang 3); membuka lowongan untuk posisi penyelia dan ketua tim bagi masyarakat asli Papua berdasarkan kemampuan; secara aktif mendorong masyarakat Papua untuk menjadi <i>Challengers</i> di bagian Operasional, S&OR dan Proyek dengan menawarkan magang guna mencapai standar yang dibutuhkan untuk menjadi <i>Challenger</i>.</p> <p>Sesuai komitmen pengembangan besar kami, kami tak hanya menawarkan pelatihan bagi masyarakat asli Papua dan non-Papua yang dipekerjakan BP, tapi juga pelatihan grup untuk membantu masyarakat asli Papua dan Bintuni yang kami pekerjakan melalui mitra ketiga (TPC), agar mereka dapat memiliki kemampuan yang dapat dipasarkan. Kami juga telah memulai program pengembangan bagi masyarakat asli Papua dan Bintuni yang dipekerjakan oleh kontraktor agar mendapatkan keterampilan dasar di BLKI Sorong. Program ini dapat membantu mereka bersaing mendapatkan pekerjaan di masa depan. Sebuah program lanjutan menawarkan beasiswa bagi individu untuk menyelesaikan program serupa di SMK Migas.</p>	<p>Keamanan, Perawatan, H&M, dan H&S.</p> <p>Di masa depan, Tangguh harus fokus membangun program terstruktur dan terpadu untuk AMDAL berikutnya, termasuk komitmen untuk meningkatkan keterampilan pekerja dari masyarakat asli dan pekerja Papua lainnya. LNG Tangguh juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan/ atau pusat pelatihan keterampilan untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat asli terpilih dari wilayah sekitar. Tujuannya adalah memberdayakan mereka agar dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di Papua Barat. Demi mengembangkan keterampilan teknis, Tangguh akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk berinvestasi dalam pengembangan Pusat Penilaian (Penyaringan dan Pengembangan Keterampilan Teknis Dasar), dan untuk mendirikan Sekolah Politeknik.</p>
Tata Kelola dan Transparansi	19. BP harus meningkatkan dukungannya terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat yang lebih transparan dan akuntabel.	Fokus utama kami adalah membangun kapasitas Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Di tingkat provinsi, kami bekerja keras meningkatkan hubungan kami dengan pemerintah. Kami menggelar lokakarya transparansi bersama EITI di bulan Juli 2012 yang dihadiri pejabat pemerintah	BP telah meningkatkan keterlibatannya dan memperkuat hubungannya dengan Pemerintah Papua Barat seiring proses AMDAL Pengembangan Tangguh. Dalam dengar pendapat AMDAL tanggal 18 Februari 2014, Gubernur hadir untuk memberikan dukungannya terhadap proses AMDAL.

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
		<p>Papua Barat. Kedepannya, kami akan bekerja sama dengan mitra ahli untuk menjalankan kegiatan peningkatan pengetahuan yang difokuskan pada transparansi dan akuntabilitas.</p>	<p>BP secara aktif menengahi komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta pemerintah pusat untuk memastikan transparansi aliran pendapatan.</p> <p>Ke depannya, BP akan bekerja sama dengan Pemerintah Papua Barat dan Badan Usaha Milik Papua Barat guna menjalankan studi kelayakan untuk konstruksi pembangkit listrik tenaga gas untuk elektrifikasi berbagai wilayah di Provinsi Papua Barat dan Papua. Tangguh telah menyatakan siap menyuplai hingga 0,16 mtpa (setara dengan ca.20 mmscfd) LNG untuk membangkitkan listrik di Provinsi Papua Barat dan Papua. Di studi itu, BP akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas guna memastikan gas yang dialokasikan Tangguh akan digunakan untuk membangkitkan listrik untuk elektrifikasi wilayah di Papua Barat dan Papua.</p>
Tata Kelola dan Transparans	<p>20. BP harus berkonsultasi dengan Bank Dunia untuk menentukan apakah pembaruan Analisis Pengeluaran Papua, terutama untuk Papua Barat dan Teluk Bintuni dapat dilakukan dan bermanfaat.</p>	<p>Kami akan mengevaluasi kemungkinan pembaruan Analisis Pengeluaran Papua melalui kemitraan kami dengan organisasi yang berpengalaman dan berpengetahuan luas serta memiliki kredibilitas di bidang ini.</p>	<p>Kami membuat kesepakatan dengan konsultan dari UGM untuk melaksanakan penilaian ini. Meski demikian, UGM mengundurkan diri dari proyek ini di bulan Maret 2014. Kami akan mencari institusi lain yang andal, misalnya Bank Dunia dan Universitas Indonesia, untuk menjajaki kemungkinan mereka melaksanakan studi pengeluaran terhadap Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni.</p>
	<p>21. BP harus membantu Pemerintah Provinsi seperti saat membantu Pemerintah Kabupaten dalam merancang Perdasus yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.</p>	<p>Kami setuju. Kami akan mendukung Pemerintah Provinsi dengan meminta UNIPA menyusun naskah akademik yang dibutuhkan untuk membuat Perdasus. Kajian ini akan mencakup analisis sosial dan hukum yang komprehensif dan merefleksikan kepentingan pemangku kepentingan utama.</p>	<p>Tangguh mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perdasus dana bagi hasil minyak dan gas. Naskah akademiknya dikembangkan oleh tim UGM dan UNIPA dengan mempertimbangkan aspirasi lokal. Sebuah studi banding dengan Aceh juga dilaksanakan untuk mempelajari praktik dan pengalaman terkait efisiensi Perdasus. Berdasarkan studi tersebut, draf Perdasus mengakomodasikan hak adat sebagai penerima pendapatan, dan hal ini akan</p>

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
			membangun penerimaan masyarakat terhadap Tangguh.
	22. BP harus mendorong semua pihak untuk memasukkan peraturan mengenai pembayaran klaim kepemilikan adat ke dalam Perdasus.	Kami mendukung ide ini melalui penyusunan naskah akademik oleh UNIPA untuk persiapan pembuatan Perdasus.	Terakhir, di pengujung Desember 2013, DPRD Papua Barat meratifikasi draf Perdasus dan draf tersebut kini sedang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Pengelolaan Pendapatan	23. BP harus mendorong pihak-pihak terkait agar Perdasus memuat langkah-langkah yang menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas menyangkut dana yang dialokasikan.	Kami mendukung langkah ini dan sebagai penanda tangan EITI, kami yakin transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik akan bermanfaat bagi semua pihak.	Draf Perdasus terakhir memuat mekanisme laporan dan pemantauan dana bagi hasil. Mekanisme ini mencakup prinsip akuntabilitas dan transparansi. BP akan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memonitor implementasi dan efektivitas peraturan ini.
Lingkungan	24. BP harus menargetkan status emas dalam penilaian lingkungan yang dilakukan oleh KLH.	KLH menggunakan metode evaluasi (Proper) yang sangat ketat yang membutuhkan kepatuhan 100% untuk mencapai status hijau. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai status hijau di tahun 2013 kemudian mempertahankannya selama 3 tahun berturut-turut untuk meraih status emas.	Tangguh meneruskan usahanya memenuhi standar yang ditentukan KLH untuk mencapai status hijau dan selanjutnya emas.
Lingkungan	25. Dukungan berkelanjutan untuk kegiatan perencanaan tata ruang kabupaten harus mencakup kepatuhan terhadap rencana penggunaan lahan yang melindungi lingkungan Teluk Bintuni.	Kami telah membantu pengembangan dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Teluk Bintuni yang telah disahkan sebagai Peraturan Daerah sejak Juli 2012. Hal ini mencakup penggunaan lahan untuk perlindungan lingkungan.	Dokumen perencanaan tata ruang telah jadi perangkat utama bagi pemangku kepentingan utama untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah ini. Melalui program tata kelola kami, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lokal lain didorong untuk memonitor rencana tata ruang dalam perencanaan tahunan untuk melindungi tanah lokal dari penyalahgunaan.
Lingkungan	26. Daerah penangkapan ikan, udang dan kepiting di Teluk Bintuni serta potensi kontaminan harus dites dan dilaporkan secara berkala sepanjang masa operasional Tangguh.	Kami setuju. Kami menguji daerah penangkapan ikan, udang dan kepiting di Teluk Bintuni secara berkala. Kami akan melakukan tes berikutnya di semester pertama 2013. Tangguh juga akan memonitor kualitas air limbah untuk memeriksa potensi kontaminan secara berkala sesuai	Hasil terkini dari penilaian kondisi perikanan dan kondisi perairan di Teluk Bintuni di tahun 2013 oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa kualitas lingkungan dan sumber daya alam di Teluk masih dalam kondisi baik dan kontaminan berada di bawah ambang batas.

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
		persyaratan Pemerintah Indonesia serta menguji kualitas air laut di sekitar wilayah Tangguh.	Penilaian juga menyimpulkan bahwa kegiatan operasional Tangguh tidak memiliki dampak besar terhadap kegiatan perikanan lokal.
Pengembangan Tangguh	27. BP harus melakukan lebih banyak hal untuk menanggapi ketidakseimbangan perumahan dan infrastruktur di kampung DAV di pesisir pantai utara dan selatan dalam AMDAL yang baru.	Kami sedang menjajaki beberapa cara untuk mengatasi masalah ini melalui kemitraan dengan Pemerintah Lokal dan Pusat. Hal ini juga merupakan salah satu elemen penting dalam AMDAL Pengembangan Tangguh yang tengah berjalan.	<p>MoU tidak mengikat antara Tangguh dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Teluk Bintuni yang ditandatangani Pada 4 Desember 2014. MoU tersebut mencatat niat Tangguh untuk menyediakan bantuan dana untuk restorasi pemukiman bagi masyarakat asli di Pesisir Pantai Utara dari Distrik Weriagar dan Tomu.</p> <p>Seperti disebutkan dalam draf program AMDAL baru, Tangguh akan bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni untuk merancang program bersama guna mengimplementasikan bantuan langsung dan nyata. Hal ini akan dilaksanakan dalam beberapa fase setelah AMDAL untuk Proyek Pengembangan Tangguh disetujui.</p> <p>Saat ini, pra-studi kelayakan terkait aspek teknis dan sosial proyek pemukiman telah diselesaikan. Proyek renovasi pemukiman diharapkan selesai bersamaan dengan Proyek Pengembangan Tangguh.</p>
Pengembangan Tangguh	28. BP harus berkomitmen menambah tenaga kerja asli Papua agar tiap keluarga Papua di kampung DAV berpeluang memiliki anggota keluarga yang bekerja di BP atau mitranya. Jika jumlah pekerjaan yang tak membutuhkan keterampilan tidak cukup untuk memenuhi target ini selama pengembangan berjalan, masyarakat asli Papua dari kampung DAV harus dilatih untuk pekerjaan yang membutuhkan sedikit keterampilan.	Kami berkomitmen membantu masyarakat lokal Papua untuk mengembangkan keterampilan yang dapat ditransfer melalui operasi dan pengembangan kami saat ini. Proyek Tangguh telah mengirim 29 pekerja Papua dari kampung DAV yang dipekerjakan oleh kontraktor untuk menjalani pelatihan keterampilan sebelum konstruksi Pengembangan Tangguh dimulai. Kami akan menerapkan strategi perekrutan dan pengembangan yang dapat memenuhi kebutuhan proyek dan membantu meningkatkan kapasitas lokal dalam proses AMDAL. Hal ini akan mencakup	Komitmen AMDAL baru akan memprioritaskan masyarakat asli untuk bekerja di Tangguh dan menyediakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja. Beasiswa tambahan juga akan disediakan bagi siswa masyarakat asli guna menciptakan <i>talent pool</i> yang lebih besar untuk ketenagakerjaan di Tangguh di masa depan atau pekerjaan lain di Bintuni. Tak hanya itu, sebuah program baru, Pengembangan Usaha Masyarakat Asli (IEDP) telah digagas untuk menciptakan mata pencaharian alternatif selain bekerja di Tangguh.

Topik	Isu dan risiko teridentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP November 2012	Rencana dan status tindakan
		<p>perekrutan di Tangguh dan pilihan mata pencaharian lain yang dapat membantu pembangunan sosial dan ekonomi serta menjamin keberlanjutan Operasional Tangguh.</p>	
<p>Pengembangan Tangguh</p>	<p>29. BP harus mempertimbangkan menggunakan gas Tangguh atau cadangan listrik untuk proyek elektrifikasi Papua Barat yang lebih luas sebagai tujuan jangka panjang.</p>	<p>Kami setuju. Sebagai bagian dari Rencana Pengembangan (POD II) untuk Tangguh Kilang 3 yang saat ini tengah menunggu persetujuan Pemerintah Indonesia, kami akan mengalokasikan 15 mmscfd gas Tangguh sebagai sumber energi bagi proyek elektrifikasi yang lebih luas di wilayah Provinsi Papua Barat bila Kilang -3 sudah mulai beroperasi.</p>	<p>PoD II Tangguh kilang 3 yang telah disetujui mencakup komitmen untuk mengalokasikan hingga 15 mmscfd gas dari Tangguh untuk menghasilkan listrik di wilayah Papua Barat yang lebih luas.</p> <p>Meski demikian, sebagai bentuk tanggapan terhadap permintaan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Tangguh sepakat meningkatkan komitmennya untuk memasok dan menjual hingga 0,16 mtpa LNG (setara dengan 20 mmscfd gas) untuk elektrifikasi berbagai wilayah di Provinsi Papua Barat dan Papua. Surat konfirmasi terkait komitmen Tangguh ini telah dikirim ke SKK Migas tanggal 22 Mei 2014.</p>